



Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Turki: Kajian Historis, Ideologis, dan Struktural Dalam Perspektif Global

Ika Kurnia Sofiani¹, Ismawanto², Muhammad Febrian Syah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

Email: ikur.wafie@gmail.com¹, ismawanto274@gmail.com²,
muhhammadfebriansyah627@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Turki dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sistem Pendidikan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengintegrasikan aspek agama dan modernitas, sementara Turki berlandaskan prinsip Kemalisme dengan orientasi sekularisme. Perbedaan latar belakang sejarah dan ideologi mempengaruhi struktur, kurikulum, dan pendekatan pendidikan di kedua negara. Indonesia menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil dan keulaitas tenaga pengajara yang beragama. Turki menitikberatkan pada modernisasi pendidikan dengan penekanan pada sains dan teknologi. Melalui perbandingan ini, kedua negara memiliki peluang untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik guna menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan. Pendidikan bisa menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi.

Kata Kunci: Dinamika Pendidikan di Indonesia, Perbandingan Pendidikan Turki

Abstract

This study compares the education systems in Indonesia and Turkey using a qualitative approach. The Indonesian education system is based on Pancasila values that integrate aspects of religion and modernity, while Turkey is based on the principles of Kemalism with a secular orientation. Differences in historical background and ideology affect the structure, curriculum, and approach to education in both countries. Indonesia faces challenges in the form of disparities in access to education in remote areas and the diversity of teaching staff. Turkey emphasizes the modernization of education with an emphasis on science and technology. Through this comparison, both countries have the opportunity to learn from each other and share best practices in order to create inclusive, adaptive and sustainable education policies. Education can be a catalyst for improving the quality of human resources in the era of globalization.

Keywords: Dynamics of Education in Indonesia, Comparison of Turkish Education

Pendahuluan

Pendidikan adalah aspek fundamental dalam berdirinya suatu negara. Setiap negaramemiliki sistem pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah dan tujuan nasionalnya. Pendidikan secara bahasa berasal dari kata Yunani, Paedagogy. Paedagogy sendiri berarti seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan (Ahdar, 2021).

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana guna menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang mendukung, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka dalam hal pengendalian diri, pembentukan kepribadian, dan peningkatan kecerdasan., ketrampilan serta akhlak mulia yang diperlukan dirinya saat terjun ke Masyarakat. Namun keberagaman geografis, sosial dan budaya Indonesia sering kali menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan pendidikan terutama di daerah terpencil. Di sisi lain, Turki sendiri memiliki sejarah panjang dalam pendidikan. Pendidikan di Turki dipengaruhi oleh warisan Kesultanan Utsmaniyah dan reformasi modern yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Salah satu reformasi terbesar Atatürk adalah menerapkan sistem pendidikan sekuler untuk mempercepat modernisasi bangsa. Turki jugadikenal dengan pendekatan pendidikan terpusat yang dikendalikan Kementerian Pendidikan Nasional Turki.

Pada kajian pustaka akan diuraikan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah ada dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa judul penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: Artikel yang berjudul *Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Turki: Kajian Historis, Ideologis, dan Struktural dalam Perspektif Global*.

Dalam penelitiannya membahas isu kesetaraan akses pendidikan di Indonesia dan Turki, terutama terkait tantangan. Pada penelitian ini membahas kesamaan dan perbedaan struktur pendidikan, kebijakan kurikulum antara kedua negara. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh globalisasi mempengaruhi pendidikan Turki. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada tantangan domestik seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Perbandingan kedua sistem pendidikan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan kebijakan. Di Indonesia, pendidikan cenderung memadukan nilai-nilai keagamaan dengan pendidikan umum, dilihat dari sistem madrasah yang berkembang pesat. Sementara Turki menekankan pendidikan sekuler sebagai dasar utama. Perbedaan ini mencerminkan masing-masing latar belakang sejarah negara, dimana Indonesia pada tradisi masyarakat multikultural dan religius sedangkan Turki berorientasi pada reformasi modernisasi berbasis negara bangsa. Indonesia dan Turki merupakan dua negara dengan latar belakang sejarah yang berbeda, namun memiliki beberapa kesamaan dalam perjalanan modernisasi pendidikan. Melalui perbandingan ini diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pendidikan. Hal ini tidak hanya relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masing-masing negara, tetapi juga sebagai pembelajaran lintas negara untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di era tantangan global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis dan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Turki. Metode studi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada pada sistem pendidikan Indonesia dan Turki. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, yang berfokus pada pemaparan sistem pendidikan kedua negara berdasarkan variabel tertentu seperti ideologi, kurikulum, aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Data yang dikumpulkan diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan, jurnal akademik, buku referensi, serta artikel ilmiah terkait sistem pendidikan Indonesia dan Turki.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Sistem Pendidikan dan Letak Geografis Negara Indonesia

Menurut Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan total 13.466 pulau, luas daratan Indonesia mencapai 1.9922.570 km², Sementara luas wilayah perairannya sebesar 3.257.483km². Informasi ini didasarkan pada data geospasial yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Mengutip situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautandan Perikanan, dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² merupakan laut, termasuk 2.55juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada awal mulanya sebelum kedatangan Belanda, Indonesia sebelumnya kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16 kemudian disusul oleh Bangsa Spanyol. Ketika bangsa Portugis tiba di Indonesia perdagangan cengkih berpusat pada daerah-daerah kerajaan Islam yaitu Ternate dan Tidore. Bangsa Portugis kemudian pindah ke Semenanjung Leitimot dan mendirikan sebuah benteng yang kemudian menjadi Kota Ambon. Portugis membuka perkebunan pohon cengkih dan sampai akhir abad ke 16 terciptalah suatu balance of power antara orang Portugis di Leitimor dan orang Islam di Hituserta orang Ternate di Semenanjung Hoamoal.

Pada tahun 1536 pada masa-masa kedudukan orang Portugis di Maluku penguasapada saat itu Antonio Galvano mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak para pemuka pribumi di Ternate. Murid-murid yang berasal dari golongan pribumi bisa melanjutkan studinya di Goa (India) yang merupakan pusat kekuatan orang-orang Portugis di Asia (Makmur et al., 1993). Tahun 1546 terdapat tujuh buah kampung pemeluk Agama katolik roma. Saat bangsa Portugis sedang berperang dengan Bangsa Spanyol dan Inggris, Belanda datang kemudian merebut kekuasaan.

Akhir abad ke 16 dan awal ke 17 Belanda datang untuk menanam dan memperkuat pengaruhnya di Indonesia. Pada tahun 1585, Portugal berada di bawah kekuasaan Kerajaan Spanyol yang menganut agama Katolik Roma. Sementara itu, bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan tengah berjuang melawan penjajahan Spanyol melalui Perang Delapan Puluh Tahun. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat Belanda, sehingga mereka mulai mencari sumber perdagangan secara langsung, terutama rempah-rempah.

Sistem Pendidikan di Indonesia pada Zaman Kolonial Belanda

Belanda kemudian menuju nusantara untuk mendapatkan bahan-bahan mentah tersebut serta untuk memperdagangkan rempah-rempah tersebut. Sistem Pendidikan di Indonesia pada zaman Kolonial Belanda Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan kepentingan perdagangan. Untuk melaksanakan hal tersebut pemerintah Belanda melalui keputusan sidang Staten General memberikan kekuasaan penuh kepada perserikatan kongsi dengan Belanda di Hindia Timur, yaitu VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). VOC diberi kekuasaan untuk menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Awalnya kedatangan orang belanda ke Indonesia bertujuan untuk menjalin hubungan dagang dengan masyarakat setempat. Namun sambil berdagang, mereka juga berupaya mempengaruhi penduduk lokal. Belanda tidak hanya memonopoli perdagangan, tetapi secara bertahap berhasil menaklukkan penguasa-penguasa lokal dan merebut wilayah mereka, yang kemudian dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Hal ini menjadi awal dari berlangsungnya sistem penjajahan (Novita Sari dkk, 2023)

Pada pertengahan abad 19 Belanda mulai membuka sekolah seperti ELS (Europeesche Lagare School). Sekolah ini menggunakan model pendidikan barat modern. Pendidikan gaya barat terus berkembang seiring dengan menguatnya kekuasaan orang Belanda di Indonesia.

Pada tahun 1818, pemerintah Belanda menetapkan aturan terkait penyelenggaraan sekolah, namun aturan ini hanya mengatur pendidikan bagi anak-anak keturunan Belanda.

Sistem pendidikannya dibagi menjadi dua jenjang, yaitu pendidikan dasar yang disebut *Europeesche Lagere School (ELS)* dan pendidikan menengah bernama *Hogere Burger School (HBS)*. Sementara itu, anak-anak pribumi memperoleh pendidikan secara sederhana di tempat-tempat seperti halaman kabupaten, gubuk, atau wilayah pedesaan. Pendidikan pribumi ini dijalankan tanpa dukungan dari pemerintah pusat (Dzakiyya Azizah, 2024). Selain sekolah Eropa bagi anak-anak orang Belanda dan Sekolah Bumi putra untuk masyarakat Pribumi Kelas bawah terdapat sekolah Agama yang berlandaskan nilai-nilai ke Islaman. Sekolah agama yaitu pesantren dan madrasah menjadi alternatif bagi pendidikan tradisional masyarakat pribumi.

Pendidikan di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum negara ini resmi berdiri. Sistem pendidikan telah berkembang sejak masa kuno, kemudian berlanjut pada era Hindu-Buddha, masa penyebaran Islam, masa penjajahan, hingga masa kemerdekaan. Bahkan sebelum kedatangan bangsa Belanda, pendidikan Islam sudah mulai tumbuh dan menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara.

Pelaksanaan pendidikan Islam berlangsung dengan cara yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan untuk bangsa Belanda. Pendidikan Islam berkembang sejalan dengan kegiatan dakwah dan penyebaran agama Islam. Namun, saat Belanda mulai menjajah, pendidikan Islam menghadapi berbagai kendala. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sejumlah peraturan dan kebijakan yang secara umum bertujuan membatasi serta menghambat pertumbuhan dan kemajuan pendidikan Islam (Kodir, 2018). Pada tahun 1832, dibentuk sebuah lembaga bernama *Presterraden* yang memiliki tugas mengawasi aktivitas keagamaan dan pendidikan Islam. Selanjutnya, pada tahun 1925, pemerintah Belanda menetapkan peraturan yang membatasi siapa saja yang diperbolehkan mengajarkan pelajaran mengaji.

Kemudian, pada tahun 1932, diterbitkan lagi peraturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menutup madrasah atau sekolah yang tidak memiliki izin resmi atau yang menyelenggarakan pengajaran yang dianggap bertentangan dengan keinginan pemerintah kolonial. Kehadiran Belanda tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, tetapi juga menekan politik dan kehidupan keagamaan rakyat. Dampak dari ikut campurnya Belanda pada pendidikan bagi orang Islam adalah terbentuknya dua golongan Pendidikan di Indonesia pada abad ke-20 yaitu: Pertama, Pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler. Kedua, Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang pada kurikulumnya berfokus pada ajaran-ajaran Agama. Pada masa itu Masyarakat Indonesia mengenal dua bentuk lembaga pendidikan yaitu pendidikan yang dikelola umat Islam dan pendidikan yang dikelola kolonial. Sistem pendidikan kolonial mengajarkan pendidikan modern liberal dan netral agama.

Pada awal abad ke-20 Belanda kemudian mendirikan sekolah-sekolah modern seperti *HIS*, *MULO*, *AMS* dan sekolah teknis. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan beberapa sekolah modern di Hindia Belanda sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan dan menciptakan tenaga kerja terdidik. Sekolah ini meliputi *Hollandsch Inlandische School (HIS)*, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, *Algemeene Middelbare School (AMS)*. *Hollandsch Inlandische School (HIS)* merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak kalangan elite pribumi. Di sekolah ini para muridnya diajarkan bahasa Belanda dan program belajar selama tujuh tahun (Afandi, 2018). Kemudian didirikan sekolah lanjutan *MULO* pada tahun 1914. Pada tahun 1915 komisi yang dipimpin Prof. Dr. J. Woltjer membentuk sekolah menengah dengan nama *Algemeene Middelbare School (AMS)*.

Kedatangan Belanda ke Indonesia awalnya bertujuan untuk perdaagangan, tetapi kemudian berkembang menjadi penjajahan yang mencakup berbagai aspek termasuk pendidikan. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sekolah dengan sistem modern namun diskriminatif. Sekolah seperti *ELS*, *HBS*, *HIS*, *MULO*, dan *AMS* dirancang terutama untuk anak-anak Belanda dan kaum elit pribumi, sedangkan pendidikan untuk anak pribumi berlangsung sederhana dengan minim dukungan dari pemerintah. Pendidikan Islam yang

sebelumnya berkembang pesat mulai terhambat akibat kebijakan kolonial yang membatasi perkembangan sekolah agama seperti madrasah dan pesantren. Upaya modernisasi dilakukan Belanda memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dampak dari dualisme ini masih dirasakan sehingga mempengaruhi pola pendidikan di Indonesia.

Sistem Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Indonesia setelah meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sistem Pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Pemerintah baru berusaha untuk membangun dan memperbaiki sistem pendidikan yang telah terpuruk selama masa penjajahan. Salah satu awal yang penting adalah pembentukan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada 19 Agustus 1945 dengan Ki Hadjar Dewantara sebagai menteri pertama (Dzakiyya Azizah et al., 2024).

Sejak kemerdekaan beberapa kurikulum telah diperkenalkan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Kurikulum pada tahun 1945-1950 berfokus pada pendidikan dasar dengan penekanan pada pelajaran bahasa dan berhitung. Sekolah Rakyat (SR) didirikan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

Pemerintah mengimplementasikan pendidikan dasar wajib yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf yang masih tinggi pada saat kemerdekaan, sekitar 90% penduduk masih buta huruf (Koleksi Museum, 2021). Berbagai lembaga pendidikan baru didirikan termasuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Kemudian setelah masa awal Indonesia memasuki Masa Orde Lama tahun 1959-1966. Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde lama berlangsung dari 1945 hingga pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno Pendidikan di era ini diatur oleh beberapa undang-undang penting, yaitu: Pertama, UUD 1945: Pasal 31 mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kedua, UU No.4/1950: Menjadi dasar untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia kemudian di sempurnakan menjadi UUNo.12/1954. Ketiga, UU No. 22/1961: Mengatur tentang pendidikan tinggi (Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Kurikulum selama masa Orde lama mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan politik dan sosial pemerintah. Pertama, kurikulum 1952, yang memperkenalkan mata pelajaran yang mendukung ideologi dan kebijakan politik Soekarno. Kedua, indoktrinasi pendidikan, pendidikan digunakan sebagai alat untuk mendukung legitimasi kekuasaan pemerintah, dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan Ideologi Manipol/USDEK (Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945) (Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021).

Pendidikan pada masa Orde Lama memiliki beberapa jenjang seperti, Sekolah Rakyat (SR) setara dengan SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tinggi (SMT), kemudian Sekolah Pendidikan Teknik dan Kewanitaan yang dikenalkan untuk memenuhi kebutuhan kerja terampil dan mendukung peran perempuan dalam masyarakat (Datumula, 2020). Setelah mengalami pergeseran Presiden, sistem Indonesia memasuki babak baru yaitu sistem pendidikan Orde Baru. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966-1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem pendidikan pada masa ini mengalami perubahan yang signifikan. Kebijakan Pendidikan pada periode ini ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan jumlah lulusan pendidikan formal (Kurnia & Hudaidah, 2021).

Pendidikan pada era Orde Baru menggunakan beberapa kurikulum. Pertama, kurikulum 1968, memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berfokus pada penguasaan mata pelajaran dasar. Kedua, kurikulum 1975-1984 menekankan pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan membentuk karakter bangsa. Ketiga, kurikulum 1994 dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi, yang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan keterampilan siswa (Datumula, 2020). Jenjang pendidikan

pada masa Orde Baru terdiri dari beberapa jenjang seperti, SD dan SMP menjadi wajib bagi semua anak, SMA dan SMK diperkenalkan untuk mempersiapkan siswa menuju perguruan tinggi atau dunia kerja, dan yang terakhir pendidikan tinggi atau universitas dan institut dibangun untuk menghasilkan tenaga profesional yang dibutuhkan negara.

Pada bulan Mei 1998, Indonesia dilanda kerusuhan besar yang dipicu oleh berbagai faktor seperti maraknya korupsi, krisis ekonomi, kekurangan pangan, dan tingginya angka pengangguran. Gelombang kerusuhan ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri, mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun. Sejak saat itu, dimulailah era Reformasi, termasuk dalam sistem pendidikan nasional yang mulai mengalami perubahan setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Pendidikan di era Reformasi ditandai dengan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum menjadi aspek penting dalam era Reformasi pendidikan. Salah satu kurikulum pada era Reformasi adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Kurikulum ini merupakan konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Selain KBK selanjutnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. KTSP memberi otonomi kepada sekolah dalam menyusun silabus (Novi Septian, R., & Lilis Apriliani, S. (2022). Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum ini berfokus pada mengintegrasikan sikap, keterampilan dan pengetahuan serta menekankan pengalaman belajar aktif bagi siswa.

Selanjutnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, kurikulum merdeka merupakan inisiatif terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia yang mulai diterapkan secara luas sejak tahun 2022. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, fokus pada materi esensial dan mengembangkan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif terutama setelah dampak pandemi COVID-19.

Tujuannya adalah untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka menggunakan tiga tipe kegiatan pembelajaran. Pertama, tipe pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan di dalam kelas yang dilakukan secara terdiferensiasi. Kedua, tipe pembelajaran kurikuler, dengan mengintegrasikan proyek-proyek yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ketiga tipe pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan di luar jam pelajaran reguler yang sesuai minat siswa.

Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah secara bertahap membangun sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas untuk mengatasi dampak penjajahan, seperti tingginya angka buta huruf. Dimulai dengan pendirian Kementerian Pendidikan pada Agustus 1945, berbagai kebijakan kurikulum telah diterapkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kurikulum 1945 hingga kurikulum Merdeka pada 2022.

Pada masa Orde Lama, pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi dan stabilitas politik, sementara Orde Baru berfokus pada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Era Reformasi membawa pendekatan baru yang lebih fleksibilitas, relevansi materi, dan pengembangan karakter siswa dalam menghadapi tantangan global. Transformasi sistem pendidikan Indonesia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan generasi yang terampil, berkarakter, dan kompeten dalam menjawab tuntutan zaman, meskipun tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan tetap perlu diatasi.

Sejarah System Pendidikan di Turki

Pada masa Abad Pertengahan, terdapat tiga kekaisaran Islam besar yang berpengaruh, yaitu Kekaisaran Ottoman di wilayah Turki, Kekaisaran Safawi di Persia, dan Kekaisaran

Mughal di India. Ketiga kerajaan ini menandai pergeseran pusat kekuasaan dari dunia Arab yang sebelumnya dominan pada era klasik. Di antara ketiganya, Kekaisaran Ottoman merupakan kerajaan yang bertahan paling lama. Secara geografis, Turki terletak di kawasan selatan Semenanjung Balkan, barat Laut Hitam, serta timur laut Laut Mediterania, menjadikannya sebagai negara yang berada di antara benua Asia dan Eropa. Wilayah Turki mencakup sekitar 783.562 km² dengan jumlah penduduk sekitar 84 juta jiwa (Novita Sari & Komarudin Sassi, 2023). Perbandingan pendidikan antara Indonesia dan Turki menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam sistem pendidikan, struktur kurikulum serta kebijakan pendidikan di kedua Negara.

Pendidikan di Indonesia dan Turki

Indonesia menganut ideologi yang berlandaskan pada Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara sekaligus menjadi pandangan hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi ini terdiri dari lima sila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sedangkan Turki, ideologi nya dikenal sebagai Kemalisme. Kemalisme merupakan hasil pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Kemalisme terdiri dari enam prinsip dasar atau sering disebut dengan enam anak panah yaitu Republikanisme, mengganti sistem monarki Ottoman dengan republik konstitusional yang menekankan kedaulatan rakyat dan pemerintah berdasarkan hukum. Populisme, menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan menolak dominasi Elit politik. Nasionalisme, mendorong rasa bangga dan identitas nasional di kalangan rakyat Turki. Menghilangkan pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya Ottoman yang dianggap menghambat. Lasisme, memisahkan agama dari urusan pemerintahan, memastikan bahwa negara tidak mendukung atau melarang agama tertentu. Statisme, menekankan peran aktif negara dalam ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Reformasi, mendorong pembaharuan teknologi dan nilai-nilai modern Barat (Tabrani, 2016).

a. Struktur Pendidikan di Indonesia dan Turki

Struktur jenjang pendidikan mencakup tingkatannya, seperti pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Setiap tingkatan ini memiliki tujuan dan kurikulum yang berbeda sesuai dengan perkembangan kognitif dan sosial pada tahap tertentu.

Sistem pendidikan Indonesia mempunyai struktur 12 tahun wajib belajar yang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar (SD), 3 tahun pendidikan menengah atas (SMA/SMK). Setelah itu bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sedangkan Turki, sistem pendidikan 12 tahun wajib belajar. 4 tahun sekolah dasar (SD), 4 tahun sekolah menengah pertama, dan 4 tahun sekolah menengah atas. Kemudian lanjut sekolah tinggi. Struktur pendidikan Indonesia dan Turki menunjukkan kesamaan dalam penerapan wajib belajar dan peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan sistem kurikulumnya.

b. Kurikulum dan Mata Pelajaran di Indonesia dan Turki

Kurikulum secara terminologis diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar (Thohri, M. 2023). Kurikulum pendidikan di Indonesia mencakup mata pelajaran seperti PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni, Olahraga, serta Pendidikan Agama. Sementara itu, kurikulum di Turki mencakup mata pelajaran seperti Seni dan Kerajinan, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, bimbingan karier, Matematika, Musik, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama dan Etika, IPA, IPS, Sejarah Turki, serta Bahasa Turki. Selain itu, pengenalan bahasa asing seperti

Inggris, Prancis, dan Jerman sudah dimulai sejak siswa duduk di kelas empat.

Kurikulum pendidikan Indonesia dan Turki dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai budaya, kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Kurikulum Indonesia menekankan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, penguatan karakter, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum nya juga merangkum pembelajaran agama, bahasa, matematika, sains dan keterampilan hidup. Kurikulum Turki fokus untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah dan kolaborasi. Penggunaan bahasa asing seperti Inggris juga ditekankan untuk meningkatkan daya saing internasional.

c. Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Turki

Kualitas pendidikan mencakup semua aspek dari sistem pendidikan termasuk kurikulum, pengajaran, fasilitas, manajemen, dan tenaga pendidik. Kualitas sendiri tidak hanya diukur dari prestasi akademik tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Indonesia menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, distribusi guru yang tidak merata, serta kualitas lulusan yang bervariasi. Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia berusaha memperbaiki hasil belajar siswa melalui kebijakan baru dan peningkatan anggaran. Sedangkan Turki, memiliki reputasi yang baik dengan beberapa masuk dalam peringkat dunia. Turki terus melakukan reformasi untuk memastikan bahwa sistem Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

d. Aksesibilitas dan Kesenjangan Pendidikan di Indonesia dan Turki

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan berbagai program untuk memastikan keberadilan, pemerataan, dan peningkatan akses pendidikan. Program ini termasuk Dana Bos, PIP Program Indonesia Pintar dan Platform Merdeka Mengajar. Program-program inidiharapkan bisa membantu untuk menyamakan kualitas pendidikan. Turki juga mempunyai Program EBA (Education Information Network). Program ini adalah platform pendidikan digital yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran terutamakonteks pendidikan jarak jauh. Platform ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh terutama selama pandemi Covid-19. Selama pandemi EBA menjadi salah satu platform pendidikan paling banyak digunakan di Turki, dengan lebih dari 7 juta siswa dan lebih dari 1 juta guru aktif menggunakan layanan ini di Turki.

e. Tantangan dan peluang dalam era global. Pendidikan di Indonesia dan Turki

- 1) Faktor pendidikan di Turki menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah. Di wilayah barat yang lebih maju seperti Istanbul dan Ankara, fasilitas pendidikan umumnya lebih lengkap dan mutu pengajaran lebih tinggi. Namun, di wilayah timur dan tenggara, terutama di daerah pedesaan, banyak sekolah yang kekurangan guru, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap teknologi pendidikan modern. Anak-anak di daerah ini seringkali mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah karena faktor ekonomi dan geografis.
- 2) Selain itu, kualitas tenaga pendidik juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, terdapat kekurangan guru yang berkualifikasi, khususnya untuk mata pelajaran sains dan matematika. Proses rekrutmen guru juga sering dianggap tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kurangnya pelatihan lanjutan dan pengembangan profesional bagi guru membuat kualitas pengajaran stagnan dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman.

- 3) Kurikulum pendidikan di Turki juga mengalami kontroversi karena dinilai terlalu sering berubah mengikuti arah politik pemerintah yang berkuasa. Misalnya, beberapa perubahan besar dalam kurikulum mencerminkan peningkatan pengaruh agama dalam sistem pendidikan, seperti penambahan pelajaran agama Islam dan penghapusan materi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konservatif, termasuk teori evolusi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya prinsip sekularisme yang selama ini menjadi dasar negara Turki modern.
- 4) Isu ketimpangan gender dan hak-hak kelompok minoritas juga turut membayangi dunia pendidikan di Turki. Di wilayah yang lebih konservatif, anak perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, terutama di jenjang menengah dan tinggi. Selain itu, kelompok etnis minoritas, seperti Kurdi, belum sepenuhnya mendapat pengakuan hak untuk belajar dalam bahasa ibu mereka di sekolah-sekolah negeri. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan prestasi akademik di kalangan kelompok tersebut.

Kesimpulan

Indonesia mengembangkan sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan integrasi antara pendidikan agama dan umum, serta fokus pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan nilai kebangsaan. Sejarah panjang kolonialisme dan keragaman budaya Indonesia menjadikan sistem pendidikan nasional beragam, namun juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil, kualitas guru yang belum merata, dan kurikulum yang sering berubah mengikuti arah kebijakan politik.

Sebaliknya, Turki membangun sistem pendidikan modern dengan fondasi ideologi Kemalisme yang mengedepankan sekularisme, republikanisme, dan nasionalisme. Sistem ini memprioritaskan pendidikan sains dan teknologi serta penguasaan bahasa asing sebagai kunci daya saing global. Meskipun memiliki struktur pendidikan yang rapi dan terpusat, Turki juga menghadapi tantangan berupa ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, intervensi politik dalam kurikulum, serta isu diskriminasi gender dan kelompok minoritas.

Melalui pendekatan perbandingan, kedua negara dapat saling belajar dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kemajuan Turki dalam integrasi teknologi pendidikan dan penguatan sains, sementara Turki dapat belajar dari Indonesia tentang fleksibilitas kurikulum berbasis karakter dan penguatan nilai-nilai multikultural.

Di tengah arus globalisasi, kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik antarnegara menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi unggul, berdaya saing tinggi, dan mampu menghadapi tantangan masa depan secara holistik.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak*, 7(1).
Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1).
- Ahdar. (2021). *Ilmu Pendidikan* (Musyarif, Ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Asril, & Zaman, N. (2019). *Pendidikan Pancasila Kajian Historis, Ideologis, dan Agamis* (J. Alizon, Ed.). CV. Cahaya Firdaus.
- Atmaca, D. (2021). A Study on the Educational Informatics Network (EBA) Live Course Application in the "COVID-19" Pandemic Process. *Journal of Education, Theory and Practical Research*, 78(3), 301–313. <https://doi.org/10.38089/ekwad.2021.78>.
- Burhanudin, Ditta Maulida Rahma, Nabila Mufidah Zaen, & Gunawan Aji. (2024). Pendidikan Islam, Lembaga Pendidikan, dan Runtuhnya Dinasti Turki Usmani Terhadap

- Pendidikan. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 109–117. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1329>.
- BP, R. A., Munandar, A. S., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan Ilmu <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>.
- Basri, M., Sagala, H. P., Nasution, B. K. A., & Mahfudza, A. (2023). Dampak Kemunduran Kerajaan
- Badwi, A., Stai, D., & Makassar, A.-F. (2018). Sejarah Pendidikan Islam di Kerajaan Turki Usmani.
- Bahri Hasibuan, S., Kusdiana, A., Hernawan, W., & Boy Al, M. (2023). Keruntuhan Kerajaan Turki
- Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56–78.
- Dzakiyya Azizah, H., Alam, H., & Nursyaban, A. (2024). Sejarah Pendidikan di Indonesia Dari Masa Prasejarah Hingga Awal Kemerdekaan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 5, 218–224. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.458>.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Jurnal Agastya*, 9(2).
- Turki Usmani Terhadap Pendidikan. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 2(1).
- Ustmani Serta Implikasinya Terhadap Islam (1566-1924). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 228–233. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i3.77>.
- pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa :Kajian Pendidikan Islam*, 2, Nomor 1.
- kemendikbud. (2024, November 19). *Latar Belakang Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kodir, A. (2018). *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia* (A. S. Beni, Ed.). CV.Pustaka Setia.
- Koleksi Museum. (2021, March). *PENDIDIKAN MASA KOLONIAL BELANDA*. Museum Pendidikan Nasional. <https://museumpendidikannasional.upi.edu/pendidikan-masa-kolonial-belanda/>.
- Kurnia, H., & Hudaidah, H. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kondisi Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945 – 1966). *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 839–846. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.448>.
- Makmur, D., Haryono, P., Musa, S., & S, H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* (D. Makmur, Ed.). Cv. Manggala hakti.
- Mujib, A. (2024). Model Pendidikan Islam di Turki. *JIES : Pascasarjana Universitas Islam Jakarta*, 2(2).
- Novi Septian, R., & Lilis Apriliani, S. (2022). Study Komparasi Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi Era Industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Novita Sari, & Komarudin Sassi. (2023). Perbandingan Sistem Pendidikan Turki Dan Indonesia. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 305–320. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i1.499>.
- Oktavia, N. (2022). Turki: Menuju Sistem Pendidikan Modern dalam Sebuah Masyarakat Demokrasi. *Jurnal Revorma*, 2(2).
- Potensi, T., Alam, S., & Kompetensi, A. (2021). *Pembelajaran 1. Letak Indonesia Pengaruhnya*.
- Purba, G. R., Sembiring, R. K., Hasibuan, R. W., & Rizki, S. N. (2023). Kurikulum dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 186-193. <https://zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/154>.

- Qurota Aini, A., Wiyah, A., & Khoirunisa. (2024). Sistem Kurikulum yang Diterapkan Masa Reformasi. *Cendikia: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2.
- Rodliyah. (2021). *Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (M. Khusnurridlo, Ed.). IAIN Jember Press.
- Saat, S. (2011). Pendidikan Islam di Kerajaan Turki Usmani . *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(1).
- Solehudin, Sutarjo, Hidayat, D., Maryati, M., Deni Asep, Mahfud, M., Mulyadi, Wistina Seneru, Niam, F., & Khasanah. (2023). *Konsep Dasar Pendidikan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Tabrani. (2016). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *Jurnal Edukasi*, 2(2).
- Thohri, M. (2023). *Pengembangan Kurikulum* (S. Rahmi, Ed.; Vol. 1). CV. Al-Haramain Lombok.
- Tyas, D. (2020). *Mengenal Ideologi Negara* (Inung, Ed.). Alprin.
- Zailani, M., Nasution, A. F., & Siregar, N. S. (2024). Problems in Organising Non-Formal Religious Education. *Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(3), 486-498. <https://www.zia-research.com/index.php/cendekiawan/article/view/259>.